



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : HK.02.02/MENKES/217/2014**

**TENTANG  
PENERIMA BANTUAN PROGRAM PENDIDIKAN  
DOKTER SPESIALIS / DOKTER GIGI SPESIALIS ANGGATAN KE DUA BELAS  
TAHUN 2014**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan peningkatan akses dan mutu pelayanan medik spesialistik, perlu diupayakan pemenuhan kebutuhan dokter spesialis/dokter gigi spesialis diantaranya melalui program pemberian bantuan pendidikan dokter spesialis/ dokter gigi spesialis ;
- b. bahwa Kementerian Kesehatan menyediakan bantuan pendidikan bagi para peserta program pendidikan dokter spesialis/ dokter gigi spesialis yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Penerima Bantuan Program Pendidikan Dokter Spesialis / Dokter Gigi Spesialis Angkatan Ke Duabelas Periode Januari Tahun 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1207.A/Menkes/SK/VIII /2000 tentang Pendayagunaan Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052 Tahun 2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 671);
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 591/Menkes/SK/V /2007 tentang Kelompok Kerja Percepatan Peningkatan Pelayanan Medik Spesialistik melalui Pendidikan Dokter Spesialis berbasis Kompetensi;



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949/Menkes/Per/VIII/2007 tentang Kriteria Sarana Pelayanan Kesehatan Terpencil dan Sangat Terpencil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1239/Menkes/Per/XII/2007 tentang Kriteria Sarana Pelayanan Kesehatan Terpencil dan Sangat Terpencil sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6/Menkes/Per/I/2013 tentang Kriteria Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terpencil, Sangat Terpencil dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang tidak diminati (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 153)
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2013 tentang Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 741);
20. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 021/Menkes/SK/I/2011 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2010-2014;

- Memperhatikan :
1. Surat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya Nomor : 7257/UN9.1.4.1/PP/2012 tanggal 14 November 2012 hal Usulan Surat Ketetapan Kelulusan Prakuilifikasi Akademik Periode Januari 2013;
  2. Surat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran Nomor : 3537/UN6.C/PP/2013 tanggal 26 Juni 2013 hal Penetapan Calon Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis Gelombang I Tahun 2013 (Periode September 2013) Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran;
  3. Surat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Nomor : 5981/UN4.7/PP.12/2013 tanggal 30 Oktober 2013 perihal Penyampaian Hasil Seleksi Calon PPDS Bantuan Beasiswa Berbasis Kompetensi Dilingkungan Kementerian Kesehatan Periode Januari 2014;
  4. Surat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Nomor : 14004/UN10.7/AK/2013 tanggal 15 November 2013 perihal Pemberitahuan Lulus Tes Seleksi PS PDS I BK;
  5. Surat a.n Dekan Pembantu Dekan I Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret Nomor : 7272/UN27.06/PP/2013 tanggal 18 November 2013 hal Pengusulan Peserta PPDSBK Kemenkes RI;



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

6. Surat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Nomor : 6485/UN.4.7/PP.12/2013 tanggal 25 November 2013 perihal Usulan Penyampaian Hasil Seleksi Calon PPDS Bantuan Beasiswa Berbais Kompetensi Dilingkungan Kementerian Kesehatan Periode Januari 2014;
7. Surat a.n Dekan Pembantu Dekan I Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret Nomor : 7417/UN27.06/PP/2013 tanggal 28 November 2013 hal Tambahan Pengusulan Peserta PPDSBK Kemenkes RI;
8. Surat a.n Dekan Pembantu Dekan I Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret Nomor : 7549/UN27.06/PP/2013 tanggal 29 Nopember 2013 hal Tambahan Pengusulan Peserta PPDSBK Kemenkes RI;
9. Surat Koordinator Pendidikan Departemen Obstetri dan Ginekologi FK UI RSCM Nomor 1145/H2.F1.D/PS.Obsgin /PDP.00.01/2013 tanggal 12 Desember 2013 perihal Usulan Penerimaan PPDS Obsgin Periode Januari 2014;
10. Surat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi Nomor : 1754/UN12.1/PP/2013 tanggal 12 Desember 2013 perihal Usulan Calon Peserta Penerima Beasiswa PPDS-BK FK. Unsrat manado;
11. Surat Plh Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Nomor : 13632/H2.F1.D/PDP.00.01/2013 tanggal 16 Desember 2013 hal Penyampaian Nama Peserta Tubel Kemenkes Angkatan XII Periode Januari 2014 (Genap 2013/2014);
12. Surat Plh Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Nomor : 13638/H2.F1.D1/PDP.01.05.02/2013 tanggal 16 Desember 2013 perihal menyatakan sebagai mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan masih aktif pada Program Studi Obstetri dan Ginekologi FK UI;
13. Surat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Nomor : 6436/UN7.3.4/D/PP/201013 tanggal 18 Desember 2013 perihal Penerimaan Peserta PPDS-BK Kemenkes;
14. Surat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada Nomor : PPDS/11015/I/03/04/12.13 tanggal 23 Desember 2013 hal Hasil Seleksi Akademik Tubel PPDS Kemenkes Angkatan XII - Januari 2014;
15. Surat Ketua TKP PPDS Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Nomor : 94/UN16.2/PPDS/2013 tanggal 30 Desember 2013 perihal Hasil Seleksi Peserta PPDS FK Unand Periode Januari 2014;
16. Surat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Nomor : 111/UN3.1.1/PPd.6/2014 tanggal 7 Januari 2014 hal Calon Penerima Beasiswa Tubel Kemenkes Angkatan Ke XII;



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

17. Surat a.n Dekan Pembantu Dekan I Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret Nomor : 603/UN27.06/PP/2014 tanggal 13 Januari 2014 hal Tambahan Pengusulan Peserta PPDSBK Kemenkes RI;
18. Surat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala Nomor : 131/UN11.1.17/DT/2014 tanggal 15 Januari 2014 hal Hasil Seleksi Akademik Penerima Bantuan PPDS-BK Angkatan XII Tahun 2014;
19. Surat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya Nomor : 630/UN9.1.1.4.1/PP/2014 tanggal 17 Januari 2014 hal Daftar Nama Calon PPDS-BK Yang Masuk Januari 2014;
20. Surat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana Nomor : 018/UN.14.2/B.TKP-PPDS-I/1/I/2014 tanggal 28 Januari 2014 hal Peserta BK PPDS-I FK UNUD;
21. Surat Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Nomor : B/397/10/08/02/DJKUAT tanggal 10 Februari 2014 hal Usulan Nama Peserta Tugas Belajar Kemhan Untuk Mendapatkan Bantuan Pendidikan dari Kemenkes;
22. Surat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran Nomor : 939/UN6.C/PP/2014 tanggal 10 Februari 2014 hal Hasil Keputusan Peserta PPDS-I FK Unpad Yang Berasal Dari Kementerian Kesehatan RI;
23. Surat Keputusan Dekan/Penangjawab PPDS/PPDGS Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Gadjah Mada Nomor : 059/SK/KG/SP/2014 tanggal 28 Pebruari 2014 tentang Penetapan Mahasiswa Baru Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Fakultas Kedokteran Gigi UGM Calon Penerima Bantuan Pembiayaan Belajar Kemenkes RI Tahun Akademik 2013/2014;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENERIMA BANTUAN PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS/ DOKTER GIGI SPESIALIS ANGKATAN KE DUABELAS TAHUN 2014**
- KESATU : Daftar penerima bantuan program pendidikan dokter spesialis/dokter gigi spesialis yang dimaksud pada Diktum Kesatu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Bantuan program pendidikan dokter spesialis/dokter gigi spesialis sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu berupa biaya pendidikan yang diberikan kepada penerima bantuan mulai periode pendidikan Januari 2014;



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- KETIGA : Bantuan program pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua dibebankan pada Anggaran Kementerian Kesehatan dan disesuaikan dengan kondisi keuangan negara;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2014

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 15 Juli 2014

MENTERI KESEHATAN,

NAFSLAH MBOI

Tembusan :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
2. Menteri Keuangan di Jakarta;
3. Menteri Pertahanan di Jakarta;
4. Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta;
5. Panglima Tentara Nasional Indonesia di Jakarta;
6. Kepala Kepolisian Republik Indonesia di Jakarta;
7. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
8. Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan di Jakarta;
9. Ketua Konsil Kedokteran Indonesia di Jakarta;
10. Gubernur Kepala Daerah Provinsi di seluruh Indonesia;
11. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan di Jakarta;
12. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan di Jakarta;
13. Kepala Badan PPSDM Kesehatan Kementerian Kesehatan di Jakarta;
14. Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan di Jakarta;
15. Direktur Bina Upaya Kesehatan Rujukan Ditjen BUK Kementerian Kesehatan di Jakarta;
16. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan di Jakarta;
17. Ketua Umum PB IDI di Jakarta;
18. Ketua Umum PB PDGI di Jakarta;
19. Kepala Pusat Standardisasi, Sertifikasi dan Pendidikan Berkelanjutan SDM Kesehatan selaku Ketua Tim Pelaksana dan Pengelola Program Bantuan PDS/PDGS di Jakarta;
20. Kepala Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan di Jakarta;
21. Kepala Biro Kepegawaian Setjen Kementerian Kesehatan di Jakarta;
22. Ketua Pokja PPDS-BK Pusat di Jakarta;
23. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan di Jakarta;
24. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta V di Jakarta;
25. Para Kepala Dinas Kesehatan Propinsi di Seluruh Indonesia;
26. Ketua Asosiasi Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia;
27. Para Rektor Universitas penyelenggara Program Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis di seluruh Indonesia;



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

28. Para Dekan Fakultas Kedokteran/Kedokteran Gigi penyelenggara Program Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis di seluruh Indonesia;
29. Bendahara Pengeluaran Pusat Standardisasi, Sertifikasi dan Pendidikan berkelanjutan SDM Kesehatan di Jakarta;
30. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran  
Lampiran Surat Keputusan Menteri Kesehatan  
Nomor : HK.02.02/MENKES/217/2014  
Tanggal : 15 Juli 2014

DAFTAR NAMA PENERIMA BANTUAN PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS/DOKTER GIGI SPESIALIS KEMENTERIAN KESEHATAN  
ANGKATAN DUABELAS TAHUN 2014  
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET

NO	NAMA	TEMPAT, TGL LAHIR	NIP/NRPTT	STATUS PEGAWAI	UNIT KERJA ASAL	INSTANSI PENGUSUL	PROVINSI	PEMINATAN	MULAI PENDIDIKAN	SMT	PENEMPATAN KEMBALI	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>I LULUS SELEKSI AKADEMIK</b>												
1	dr. Frans Kausario Muslihan	Jakarta, 16 Maret 2013	800.1.015	Pasca PTT	Kab. Kepulauan Anambas	Puskesmas Pembantu Desa Bukit Padi, Kab.	Dinkes Kab. Kepulauan Anambas	KEPRI	Anestesiologi	Januari 2014	I	RS Bergerak Jemaja Kab. Kepulauan Anambas
2	dr. Wahyu Hananto	Karanganyar, 30 Mei 1985	32.1.0053844	Pasca PTT	Kab. Kaimana	RSUD Kab. Kaimana	RSUD Kab. Kaimana	PAPBAR	Anestesiologi	Januari 2014	I	RSUD Kab. Kaimana
3	dr. Ari Pudji Prasetyo	Surabaya, 10 Januari 1980	198001102011011003	PNS	Kota Mojokerto	RSUD Dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto	RSUD Dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto	JATIM	Ilmu Bedah	Januari 2014	I	RSUD Dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto
4	dr. Rakhman Wahyudi Mulyo	Lumajang, 19 Maret 1982	198203192010011021	PNS	Kab. Pacitan	RSUD Kab. Pacitan	RSUD Kab. Pacitan	JATIM	Ilmu Bedah	Januari 2014	I	RSUD Kab. Pacitan
5	dr. Makiyatul Munawwaroh	Gresik, 23 Maret 1980	198003232008122001	PNS	Pusat	Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Kota	Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Kota Surakarta	KEMENKES	Ilmu Penyakit Dalam	Januari 2014	I	Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Kota Surakarta
6	dr. Primarani Sekar Kalpatari	Semarang, 28 Oktober 1981	198110282008012018	PNS	Pusat	RSUP Cipto Mangunkusumo	RSUP Cipto Mangunkusumo	KEMENKES	Ilmu Penyakit Dalam	Januari 2014	I	RSUP Cipto Mangunkusumo
7	dr. Ronald Edward Mauliate Tua Nababan	Siborongborong, 10 Maret 1980	198003102009111002	PNS	Kab. Tapanuli Utara	Dinkes Kab. Tapanuli Utara	Dinkes Kab. Tapanuli Utara	SUMUT	Obstetri dan Ginekologi	Januari 2014	I	RSUD Swadana Tarutung, Kab. Tapanuli Utara
8	dr. Harsono	Malang, 30 Agustus 1973	197308302008011007	PNS	Pusat	Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Kota	Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Kota Surakarta	KEMENKES	Patologi Klinik	Januari 2014	I	Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Kota Surakarta
<b>II RESIDEN</b>												
9	dr. Adi Yurmansyah	Lubuk Linggau, 10 Juni 1980	198006102009031001	PNS	Kota Lubuk Linggau	RSUD Siti Aisyah Kota Lub	RSUD Siti Aisyah Kota Lubuk Li	SUMSEL	Ilmu Bedah	Juli 2013	II	RSUD Siti Aisyah Kota Lubuk Linggau
10	dr. Mario Pohan Silitonga	Rengat, 19 Maret 1986	800.1.012	Pasca PTT	Kab. Bintan	Pkm. Teluk bintang	RSUD Bintan	KEPRI	Ilmu Bedah	Januari 2014	I	RSUD Bintan
11	dr. Tribuwono	16 Desember 1978	197812162007121001	TNI	Ditkesad	Ditkesad	Ditjen Kuathan	KEMHAN	Ilmu Kesehatan Anak	Juli 2012	IV	Ditkesad
12	dr. Erny Kumalasari	Magelang, 1977-09-01	197709012008012016	PNS	RSJ Prof dr Soeroyo Magelang	RSJ Prof Dr Soeroyo Magelang	Kota Magelang	KEMENKES	Ilmu Penyakit Dalam	Juli 2013	II	RSJ Prof dr Soeroyo Magelang
13	dr. Maratus Sholihah	Klaten, 1981-09-07	198109072008032002	PNS	Kota Samarinda	RSUD I.A Moeis samarinda	RSUD I.A Moeis Samarinda	KALTIM	Ilmu Penyakit Paru	Juli 2013	II	RSUD I.A. Moeis Samarinda
14	dr. Alim Budianto	Ngawi, 1978-12-19	197812192006041003	PNS	Kab. Kotabaru	Puskesmas Perawatan Serongga	Bupati Kotabaru	KALSEL	Obstetri dan Ginekologi	September 2013	II	RSUD Kotabaru
15	dr. M. Ikhsan Riswanda	Banjarbaru, 1981-07-28	198107282008031004	PNS	Kota Banjarbaru	BLUD RS Banjarbaru	BLUD RS Banjarbaru	KALSEL	Obstetri dan Ginekologi	Pebruari 2014	I	RSUD Banjarbaru
16	dr. Yasir Avisena	Kalianda, 1983-06-20	08.1.0050469	Pasca PTT	Kab. Lampung Selatan	UPT Puskesmas Penengahan	RSUD dr. H. Bob Bazar, SKM	LAMPUNG	Obstetri dan Ginekologi	Agustus 2013	II	RSUD dr. H. Bob Bazar, SKM
17	dr. Yeti Musfiroh	6 Januari 1974	197401052008122001	TNI	Ditkesad	Ditkesad	Ditjen Kuathan	KEMHAN	Patologi Klinik	Januari 2013	II	Ditkesad
18	dr. Rudy Santoso	Jakarta, 1981-11-17	26.1.0052443	Pasca PTT	Kab. Supiori	Puskesmas Korido	Dinkes Kab. Supiori	PAPUA	Patologi Klinik	Januari 2014	I	RSUD Kab. Supiori
19	dr. Fitri Dona Nainggolan	Pematang Siantar, 1980-08-15	198008152010012009	PNS	Kota Pontianak	RS Khusus Provinsi Kalbar	RS Khusus Provinsi Kalbar	KALBAR	Ilmu Kesehatan Jiwa	Januari 2014	I	RS Khusus Provinsi Kalbar

